

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. 2020. Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 149-150
- Anggraini, D., Fajri, M., & Islami, S. (2023). Rent Seeking In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies). *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 129-139.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Bulan, R., Basuni, S., Santoso, N., & Bismark, M. (2019). Illegal access dalam pemanfaatan mangrove untuk arang bakau oleh masyarakat di Batu Ampar, Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 20-32.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).
- Destriana, W. H., Sugandi, Y. S., & Saputra, G. W. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government dan Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 6(2), 303-313.
- Dewi, M. K. (2022). Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 58-70.
- Dharmayanty, S., & KEBUDAYAAN, K. P. D. (2017). Larangan Masuk Pengungsi Yang Menggunakan Perahu Oleh Pemerintah Australia Ditinjau Dari The

- 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1). hlm 46.
- Faisal, F., Sari, E., Rahman, A., Sastro, M., & Yusrizal, Y. (2023). Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 180-186.
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235-254.
- Fathurohman, D. T. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Hengki Wijaya. Analisis data Kualitatif model Spradley (etnografi) Hal.6
- Howard-Hassmann, R. E. (2018). Human rights and the search for community. Routledge.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pusat Penerbitan PNRI.
- Iswinarno Setia Aji. 2019. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang
- Jailani, A. K., & Rosadi, O. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(4), 298-312.
- Kahpi, A. (2013). Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(2), 143-159.

- Komnas, H. A. M. (2021). *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam*. Komnas HAM.
- Mauliza, N. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polres Pidie) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*.
- Muryani, E. (2019). Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Bestuur*, 7(2), 84-92.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90-126.
- Nasution, Metode Research, Cet.11 Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 113
- Ningrum, V. M. (2022). *Implementasi Kebijakan E-Government pada Pelayanan Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI)*.
- Nugroho, G. S. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum atas Upaya Perusakan Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Eksplorasi Pertambangan (Studi Kasus Pertambangan oleh PT. Atlasindo Utama) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Nugroho, W. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568-591.
- Panisa, S. S. Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Menangani Kasus Pekerja Anak (CHILD LABOUR) Di India Pada Masa Covid-19 Periode 2020-2022 *(Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

- Prasetyo, A. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Illegal Mining yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.
- Prayugo, A., Prayitno, R. B., Salman, A., Firmansyah, J. P., & Gunadi, G. A. (2025). Eco Inovasi Tambang Pongkor Antam: Pengelolaan Tambang Berkelanjutan Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1), 37-47.
- Repository Fisip Unla. <https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/1105> diakses pada tgl 13 April 2025.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.
- Royen, U. I. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang) (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).
- SA Mappasere, N Suyuti - Metode Penelitian Sosial, 2019 - *researchgate.net*. hlm 33.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224.
- Samudro, E. G., & Han, M. *RESOLUSI KONFLIK PERTAMBANGAN*.
- SANTOSO, E. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL (PEMBANTU RUMAH TANGGA) (*Doctoral dissertation, Untag Surabaya*).
- Sondakh, J. (2017). Bagi hasil investasi sebagai hak masyarakat adat pada wilayah pertambangan di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 89
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm.54
- T Hakiki, R Cahyono - *Jurnal Psikologi klinis dan kesehatan*, 2015 - journal.unair.ac.id. hlm 23
- Trianto.2010. Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. *Jakarta: Kencana*. Hlm 164

- Utomo, S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 33-43.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332.
- Heriana, K. M. A., Efenelir, Q. A. Z., Widya, P., Kharisyami, Y., Nadrah, R., & Tarina, D. D. Y. (2021). Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran. *Academia Edu*, 1, 1-23.
- Budhaeri, L. K., Maharani, C. A. D., Afifah, H. N. Z., Pribadi, G. B. D., Astarina, Y., Subroto, A., & Kuspraningrum, E. (2025). Kontroversi Pertambangan Illegal Pada Tanah Ulayat Kutai Barat (Studi Kasus PT. Trubaindo Coal Mining). *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 152-161.

